

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan menuntut adanya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. Akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya hutan akan mendorong berkembangnya kemampuan, pengetahuan, dan sikap masyarakat dalam mengelola hutan secara lebih bertanggung jawab, sehingga nilai dan pandangan mereka terhadap kelestarian hutan turut mengalami perubahan (Fahmi, 2023). Dalam konteks tersebut, skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu instrumen kebijakan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan (Kaskoyo et al., 2017; Dewi et al., 2018).

Implementasi program HKm di Indonesia diarahkan untuk menekan laju deforestasi dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan (Khaeruddin, 2018). Dampak program HKm dapat dilihat dari perubahan pola pengelolaan lahan masyarakat, dari praktik yang berpotensi merusak lingkungan menuju pengelolaan yang lebih terkontrol sesuai regulasi. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan HKm juga mengalami diversifikasi, tidak hanya terbatas pada pemanfaatan lahan, tetapi berkembang ke arah usaha hasil hutan bukan kayu seperti budidaya lebah madu, hortikultura, dan pembibitan tanaman hutan (Ayu et al., 2022; Martapani et al., 2021). Keberhasilan pengelolaan HKm sangat dipengaruhi oleh peran kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai aktor utama di tingkat tapak. KTH berperan dalam mengoordinasikan anggota, mengatur tata kelola usaha, serta memastikan pemanfaatan kawasan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapasitas kelembagaan KTH, khususnya terkait kepemimpinan, partisipasi anggota, mekanisme kerja, dan kepatuhan terhadap aturan kelompok, menjadi faktor penentu



pengelolaan kawasan dan pengembangan usaha produktif (Khaeruddin et al., 2016; Dinar, 2019; Musdalifah, 2022). Lembaga yang dikelola dengan baik cenderung mampu mendorong dinamika kelompok untuk meningkatkan kinerja usaha masyarakat (Salaka et al., 2020).

Penguatan kelembagaan tidak hanya menyangkut pembenahan struktur formal, tetapi juga peningkatan kapasitas kolaboratif melalui kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan lembaga pendukung lainnya. Kelembagaan yang mampu membangun jejaring eksternal secara efektif akan lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dan dinamika pasar (Tando et al., 2022). Selain itu, studi mengenai efektivitas kelembagaan perhutanan sosial menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki sistem administrasi yang tertib, kepemimpinan partisipatif, serta mekanisme akuntabilitas internal yang berjalan baik cenderung menunjukkan kinerja pengelolaan kawasan yang lebih stabil dan produktif.

Kapasitas kelembagaan dalam konteks keberlanjutan hutan masyarakat juga mencakup kemampuan organisasi dalam mengelola konflik, menegakkan aturan internal, serta mengadaptasi strategi usaha sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi lokal. Penelitian tentang kelembagaan hutan adat menunjukkan bahwa kapasitas organisasi yang kuat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lega et al., 2024). Dengan demikian, penguatan kelembagaan bukan hanya proses administratif, melainkan transformasi kapasitas kolektif yang memungkinkan kelompok menjalankan fungsi organisasi, tata kelola usaha, serta pengawasan pemanfaatan kawasan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks KTH Batu Meana, teori penguatan kelembagaan menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana kapasitas organisasi dalam aspek kepemimpinan, partisipasi anggota, tata kelola usaha, dan jejaring kemitraan berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya lebah madu sebagai hasil hutan bukan kayu. Penguatan kelembagaan yang terarah diharapkan mampu mengatasi permasalahan internal kelompok, meningkatkan kapasitas produksi, serta menjamin keberlanjutan usaha berbasis hutan secara kolektif.

Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, program HKm telah diterapkan di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, melalui KTH Batu Meana. Kelompok ini memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup beragam, seperti cokelat, durian, dan aren, serta telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)



dengan luasan kawasan mencapai 1.575 hektar. Pemanfaatan ifokuskan pada hasil hutan bukan kayu, yang diharapkan mampu rghidupan masyarakat tanpa mengurangi fungsi lindung kawasan 3).

Salah satu peluang usaha yang berkembang di KTH Batu Meana adalah budidaya lebah madu *Trigona incisa*, yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta selaras dengan prinsip kelestarian hutan. Potensi produksi madu, roti lebah, dan propolis dari lebah *Trigona* menunjukkan prospek yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan (Budiaman et al., 2021; Budiaman, 2024). Namun, keberhasilan usaha tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis budidaya, melainkan juga sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang mampu mengatur pembagian peran, kepemilikan koloni, peningkatan kapasitas petani, serta pengawasan mutu produk.

Sejauh ini, penelitian terkait kelembagaan KTH dalam skema HKm lebih banyak menekankan pada aspek administratif, seperti legalitas organisasi, struktur kepengurusan, dan keberadaan aturan dasar kelompok (Larasati et al., 2021; Kurniawan et al., 2025). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan secara formal belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efektivitas pelaksanaan di lapangan, yang tercermin dari masih rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan kapasitas pengurus, serta belum optimalnya implementasi aturan kelompok. Di sisi lain, penelitian mengenai usaha lebah madu tanpa sengat umumnya berfokus pada aspek teknis produksi dan manfaat ekonomi, tanpa mengkaji secara mendalam peran kelembagaan kelompok tani sebagai faktor kunci keberlanjutan usaha (Sapri et al., 2022; Rahmat et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian antara kajian kelembagaan KTH dan kajian pengembangan usaha lebah madu sebagai hasil hutan bukan kayu. Hubungan antara kualitas kelembagaan KTH dengan keberhasilan peningkatan budidaya lebah madu di tingkat komunitas masih belum banyak dikaji secara integratif, khususnya pada konteks KTH Batu Meana di Sulawesi Barat. Padahal, di lapangan masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti ketimpangan kepemilikan koloni lebah antaranggota, keterbatasan benih lebah, rendahnya partisipasi anggota dalam pelatihan, serta belum optimalnya pengelolaan kelembagaan dalam mendukung kualitas dan kontinuitas produksi madu.



kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan as strategi penguatan kelembagaan KTH Batu Meana dalam lidaya lebah madu pada skema HKm. Kajian mengenai lebih banyak menitikberatkan pada aspek produksi dan

pemberdayaan, sementara analisis mengenai penentuan prioritas strategi penguatan kelembagaan yang terukur dan berbasis kondisi internal dan eksternal kelompok masih terbatas. Kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi organisasi, tata kelola, partisipasi anggota, serta pengelolaan usaha secara kolektif merupakan faktor penentu keberlanjutan usaha hasil hutan bukan kayu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kinerja kelembagaan serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan terhadap peningkatan budidaya lebah madu. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian kelembagaan dalam pengelolaan HKm serta menjadi dasar perumusan kebijakan dan program penguatan KTH di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kelembagaan KTH Batu Meana dalam pengelolaan budidaya lebah madu pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Pundau?
2. Bagaimana faktor internal dan eksternal dalam penguatan kelembagaan KTH Batu Meana dapat dianalisis dalam mendukung budidaya lebah madu?
3. Bagaimana prioritas strategi penguatan kelembagaan KTH Batu Meana dirumuskan untuk meningkatkan budidaya lebah madu pada Hutan Kemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi kelembagaan KTH Batu Meana dalam pengelolaan budidaya lebah madu pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Pundau.
 2. Menganalisis faktor internal dan eksternal dalam penguatan kelembagaan KTH Batu Meana yang mendukung budidaya lebah madu pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Pundau.
- prioritas strategi penguatan kelembagaan KTH Batu Meana
katkan budidaya lebah madu pada Hutan Kemasyarakatan.

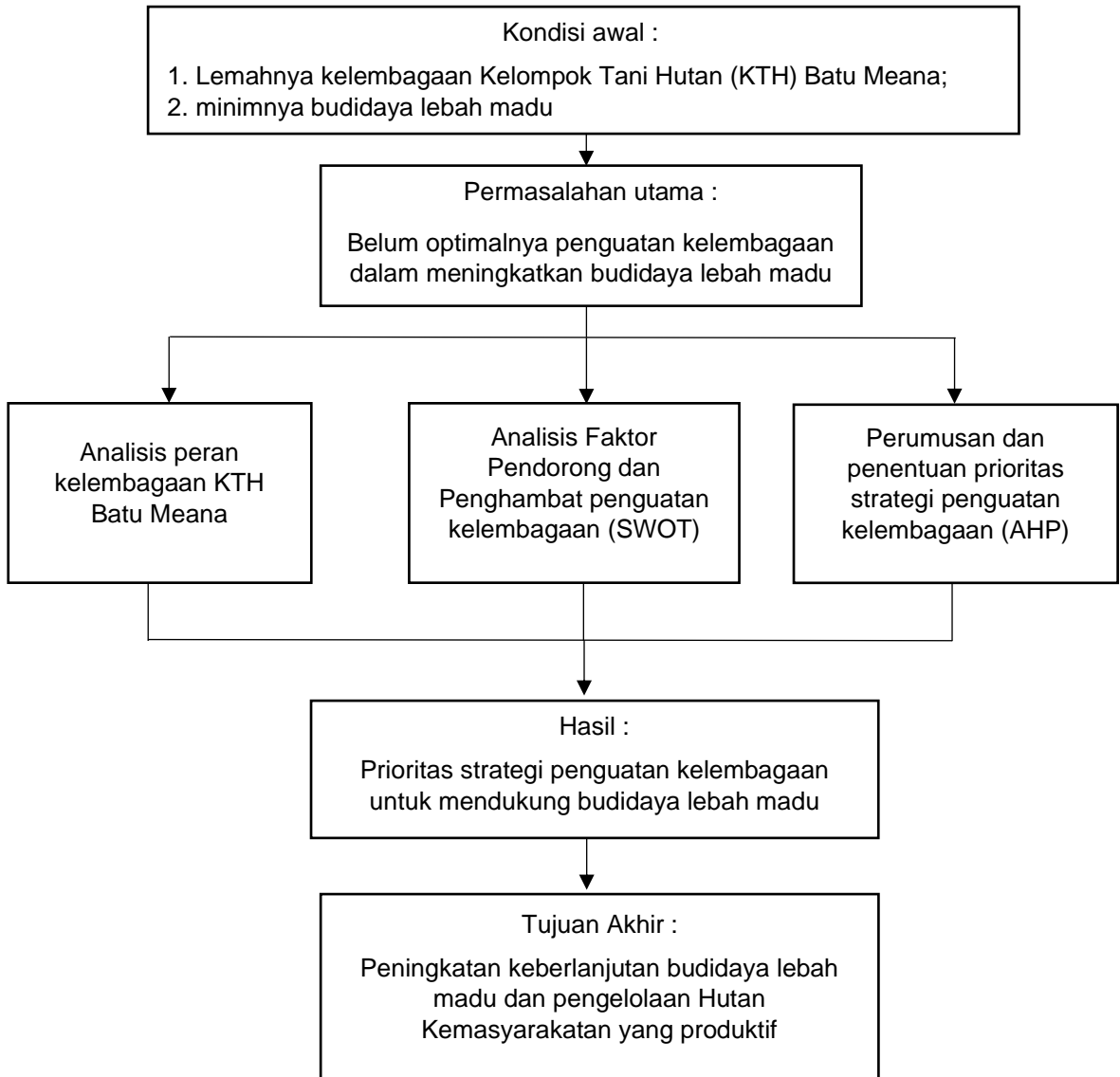


1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dalam pengembangan kelembagaan perhutanan sosial, khususnya pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Meana. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai strategi penguatan kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan usaha hasil hutan bukan kayu, terutama budidaya lebah madu pada Hutan Kemasyarakatan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi KTH Batu Meana, pemerintah, serta pemangku kepentingan dalam merumuskan prioritas strategi penguatan kelembagaan guna meningkatkan kapasitas organisasi dan keberlanjutan budidaya lebah madu, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.



1.5 Kerangka Pikir Penelitian



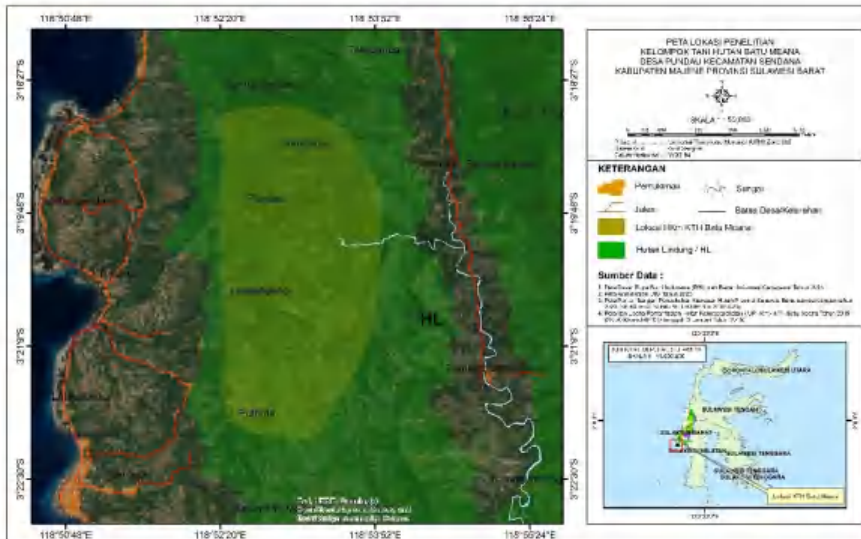
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



BAB II. METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juli sampai dengan September 2025 di wilayah Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Meana di Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene sebagai pemegang Izin Perhutanan Sosial berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm).



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan sejumlah alat yang berfungsi untuk menunjang proses pengumpulan, pencatatan, dokumentasi, serta pengolahan data, baik di lapangan maupun pada tahap analisis. Penggunaan alat tersebut dimaksudkan untuk memastikan ketepatan, keakuratan, dan sistematika data yang diperoleh sehingga mendukung tercapainya tujuan penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Alat Penelitian

| No | Alat | Kegunaan |
|----|--|---------------|
| | Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel | Mengolah data |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Kamera | Dokumentasi penelitian |
| 3. | Alat Tulis Menulis | Mencatat informasi atau data yang dibutuhkan dalam proses penelitian |
| 4. | <i>Receiver Global Positioning System</i> (GPS) | Mengambil titik lokasi penelitian |

Penelitian ini didukung oleh beberapa bahan yang berperan dalam proses pengumpulan dan penguatan data. Bahan penelitian digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh informasi dari responden serta sebagai rujukan ilmiah dalam memperkuat landasan teori dan mendukung analisis hasil penelitian. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Bahan Penelitian

| No. | Bahan | Kegunaan |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Kuesioner | Mendapatkan informasi dari responden |
| 2. | Buku dan Jurnal | Mendukung temuan penelitian dan mengembangkan atau memperkuat teori yang sudah ada |

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Jumlah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Meana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat sebanyak 180 orang. Namun, berdasarkan kondisi aktual di lapangan, anggota yang masih aktif dan terlibat dalam kegiatan kelembagaan serta usaha budidaya lebah madu berjumlah 70 orang, sehingga populasi penelitian ditetapkan sebanyak 70 anggota aktif tersebut. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Stratified Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak berdasarkan



Secara teknis penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut ini:

$$n_h = \frac{N_h}{N} \times n$$

Keterangan :

- n_h = Sampel pada Srata h
- N_h = Populasi pada Srata h
- N = Populasi Keseluruhan
- n = Sampel Keseluruhan

Berdasarkan perhitungan tersebut, dari total 70 anggota aktif ditetapkan sebanyak 40 orang sebagai responden penelitian yang tersebar pada setiap strata sesuai dengan proporsi jumlah anggota pada masing-masing kelompok. Rincian distribusi responden disajikan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Penarikan Sampel KTH Batu Meana

| Variabel srata dalam KTH Batu Meana | | Jumlah Orang | Persentasi (%) | Responden |
|---|-----------------|--------------|----------------|-----------|
| Status Keanggotaan dalam KTH Batu Meana | Pengurus KTH | 3 | 4 | 2 |
| | KUPS Cani' | 10 | 14 | 5 |
| | Anggota Lainnya | 57 | 82 | 33 |
| Total | | 70 | 100 | 40 |

Selain 40 anggota KTH yang menjadi responden dalam penelitian ini dilakukan juga pengambilan responden yang menjadi pakar dalam penelitian ini yang berjumlah 4 orang terdiri dari :

Tabel 4. Sebaran Sampel Pakar Penelitian

| No. | Sampel | Responden |
|--------|---------------------------|-----------|
| 1 | Penyuluh UPTD KPH Malunda | 2 |
| 2 | Kepala UPTD KPH Malunda | 1 |
| 3 | Akademisi | 1 |
| Jumlah | | 4 |

2.3.2 Jenis dan Sumber Data



Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Data yang atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk araan yang komprehensif mengenai kondisi kelembagaan, faktor-garuhi penguatan kelembagaan, serta dasar perumusan strategi

prioritas. Jenis data, indikator, data yang dikumpulkan, dan sumber data dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

| No. | Jenis Data | Indikator | Data yang Dikumpulkan | Sumber Data |
|-----|------------|----------------------------------|---|--|
| 1 | Primer | a. Struktur kelembagaan | Susunan organisasi, jumlah anggota, pembagian peran dan fungsi | Wawancara dengan pengurus dan anggota KTH Batu Meana, observasi langsung |
| | | b. Peran pengorganisasian | Mekanisme pengambilan keputusan, pertemuan rutin, transparansi informasi, kepemimpinan | Wawancara mendalam, observasi kegiatan KTH |
| | | c. Faktor pendorong kelembagaan | Dukungan kebijakan, pendampingan, partisipasi anggota, sinergi dengan pihak eksternal | FGD dengan anggota, wawancara dinas kehutanan dan pendamping lapangan |
| | | d. Faktor penghambat kelembagaan | Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, konflik internal, keterbatasan pasar | Wawancara dan FGD bersama anggota, pengurus, dan stakeholder |
| 2 | Sekunder | a. Dokumen kelembagaan | AD/ART, SK pembentukan, notulen rapat, laporan kegiatan, program dari instansi terkait | Arsip KTH Batu Meana, dokumen Dinas Kehutanan dan laporan pendamping |



| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | b. Profil wilayah dan sosial-ekonomi masyarakat | Luas dan kondisi hutan masyarakat, data demografi, mata pencaharian, akses ekonomi | Data dari BPS, RPJM Desa Pundau dan profil kelompok |
| | | c. Teori dan pendekatan analisis | Teori kelembagaan, teori pemberdayaan, konsep SWOT dan AHP | Literatur akademik: jurnal, buku, skripsi/tesis |

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

- 1) Menyediakan alat dan bahan yang digunakan terdiri atas panduan wawancara, kamera digital, alat rekam dan alat tulis menulis.
- 2) Melakukan Observasi berupa aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- 3) Mengidentifikasi calon responden berdasarkan anggota kelompok KTH Batu Meana dengan sampel 40 responden yang dipilih dengan metode Stratified Random Sampling.
- 4) Mengadakan diskusi kelompok terarah melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas tentang peran lembaga atau organisasi dalam konteks tertentu. FGD ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan peran lembaga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, atau mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait.
- 5) Membagikan kuesioner yang meliputi teknik menghimpun data dari sejumlah responden yang sudah ditetapkan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab. Kemudian jawaban yang diperoleh dikumpulkan sebagai data penelitian. Setelah itu, dilakukan tabulasi data yang meliputi penyesuaian skor yang diperoleh dari hasil pengisian oleh responden.



2.4 Metode Analisis Data Penelitian

2.4.1 Menganalisis Pelaksanaan Peran Kelembagaan Hkm KTH Batu Meana

Penilaian kemampuan peran kelembagaan dilakukan dengan menggunakan petunjuk teknis penilaian kelas KTH ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan. Penilaian ini dikembangkan untuk mengklasifikasikan KTH dalam 3 (tiga) kelas yaitu pemula, lanjut dan mandiri berdasarkan 3 (tiga) aspek utama yaitu Kelembagaan, usaha dan pengelolaan kawasan. Adapun aspek penilaian dan indikator kuisisioner dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian menggunakan skala Likert 1-5 (sangat tidak sesuai-sangat sesuai) yaitu :

a. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan dalam penelitian ini dianalisis untuk menilai kondisi dan kapasitas organisasi KTH Batu Meana dalam mendukung pengembangan budidaya lebah madu pada Hutan Kemasyarakatan. Penilaian dilakukan melalui beberapa komponen utama kelembagaan yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator kuesioner guna memperoleh data yang terukur dan sistematis. Komponen dan indikator aspek kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Aspek Kelembagaan

| Komponen | Indikator Kuisisioner |
|--------------|--|
| Legalitas | Memiliki SK pengesahan, AD/ART, dan nomor registrasi |
| Struktur | Struktur organisasi lengkap dan jelas |
| Administrasi | Terdapat buku catatan keuangan, anggota, rapat |
| Keanggotaan | Jumlah rapat, kehadiran anggota, keterlibatan pengurus |
| Partisipasi | Pelibatan perempuan dan kelompok rentan |



b. Aspek Usaha

Aspek usaha dalam penelitian ini dianalisis untuk mengidentifikasi kapasitas dan kinerja kegiatan budidaya lebah madu yang dikelola oleh KTH Batu Meana. Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan usaha telah berjalan secara terorganisir, produktif. Pengukuran dilakukan melalui beberapa komponen usaha yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator kuesioner agar memperoleh data yang sistematis dan terukur. Komponen dan indikator aspek usaha yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7. Aspek Usaha

| Komponen | Indikator Kuisisioner |
|-----------------|---|
| Jenis Usaha | Budidaya lebah madu dilakukan secara kolektif |
| Skala Usaha | Jumlah produksi per panen, jumlah koloni |
| Legalitas Usaha | NIB, SIUP, NPWP kelompok |
| Pemasaran | Saluran distribusi, harga jual madu |
| Manajemen | Pembukuan, pembagian hasil, pelatihan usaha |

c. Aspek Kawasan

Aspek kawasan dalam penelitian ini dianalisis untuk menilai kesesuaian pengelolaan budidaya lebah madu dengan prinsip pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang berkelanjutan. Penilaian aspek ini mencakup legalitas akses kelola, pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan, sinergi antara kegiatan usaha dengan rencana kerja, serta upaya perlindungan kawasan. Pengukuran dilakukan melalui beberapa komponen yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator kuesioner guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kondisi pengelolaan kawasan. Komponen dan indikator aspek kawasan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Aspek Kawasan

| Komponen | Indikator Kuisisioner |
|------------------|---|
| Akses Kelola | SK Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan |
| Kegiatan Kawasan | Rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan kawasan |
| Sinergi Kegiatan | Kesesuaian kegiatan budidaya lebah dengan Rencana Kerja Usaha (RKU) |
| awasan | Pengendalian kebakaran, penebangan ilegal |



tem diisi kemudian menghitung rata-rata skor tiap aspek fikasi skor total sesuai juknis Kementerian Lingkungan Hidup dan k Indonesia.

Tabel 9. Kelas KTH

| Kelas KTH | Rentang Skor Total (%) |
|-----------|------------------------|
| Pemula | 0% – <40% |
| Lanjut | 40% – <75% |
| Mandiri | ≥ 75% |

2.4.2 Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Kelembagaan KTH

1. Analisis SWOT, analisis ini digunakan untuk menemukan kekuatan pendorong dan penghambat yang merupakan faktor paling kuat dan lemah. Metode ini dapat memberikan gambaran umum untuk menilai sumber dan kekuatan suatu organisasi. Hasil skor tiap indikator dari kuisioner juknis akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dari aspek kelembagaan, usaha dan kawasan yang mendukung peran kelembagaan dan faktor-faktor yang menghambat penguatan peran kelembagaan. Mengklasifikasikan setiap faktor menjadi komponen SWOT. Faktor yang telah diklasifikasikan disusun ke dalam tabel SWOT, kemudian dilakukan penyusunan matriks SWOT untuk menentukan strategi berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal.
2. Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP), AHP digunakan untuk menentukan alternatif strategi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun langkah – langkah analisis AHP yaitu sebagai berikut :
 - a. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dari hasil struktur AHP
 - b. Menyusun kriteria penilaian, kriteria ini dapat di susun berdasarkan hasil SWOT dan wawancara FGD
 - c. Menyusun alternatif strategi dari hasil analisis SWOT (S-O, W-O, S-T, W-T)
 - d. Melakukan perbandingan berpasangan untuk menilai tingkat kepentingan relatif antara dua unsur (kriteria atau alternatif), berdasarkan skala Saaty (1-9).

Penentuan prioritas strategi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan



Metode ini memerlukan penilaian tingkat kepentingan antar ui perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparison*). Skala ng digunakan mengacu pada skala fundamental yang oleh Saaty (2012), yang memberikan bobot numerik untuk

menggambarkan tingkat kepentingan relatif antar kriteria atau alternatif. Skala penilaian tingkat kepentingan tersebut disajikan pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Skala Penilaian Tingkat Kepentingan (Saaty, 2012)

| Nilai Skala | Tingkat Kepentingan | Penjelasan |
|-------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Sama penting | Kedua elemen sama pentingnya |
| 3 | Sedikit lebih penting | Satu elemen sedikit lebih disukai daripada yang lain |
| 5 | Cukup lebih penting | Satu elemen cukup lebih disukai daripada yang lain |
| 7 | Sangat lebih penting | Satu elemen sangat lebih disukai daripada yang lain |
| 9 | Mutlak lebih penting | Satu elemen mutlak lebih disukai dan dominan dibandingkan elemen lainnya |
| 2,4,6,8 | Nilai antara dua preferensi utama | Digunakan untuk kompromi antara dua nilai skala yang berdekatan |

- e. Menyusun matriks perbandingan, matriks ini berbentuk bujur sangkar (nxn) yang berisi nilai-nilai hasil perbandingan berpasangan antara kriteria atau alternatif.
- f. Menghitung jumlah nilai untuk masing-masing kolom dari matriks perbandingan tersebut.
- g. Menormalisasi matriks, yaitu dengan membagi nilai dari setiap faktor di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total setiap kolom
- h. Menghitung bobot (prioritas), bobot tiap elemen ditentukan dengan menghitung rata-rata baris dari matriks normalisasi
- i. Menguji konsistensi hierarki dengan menghitung *Consistency Index* (CI) dan *Consistency Ratio* (CR). Adapun cara menghitung CI ialah dengan mengkalikan matriks awal dengan bobot (prioritas), bagi hasilnya per elemen dengan bobot masing-masing, kemudian melakukan rata-rata terhadap hasilnya hingga mendapatkan λ maks. Kemudian menghitung nilai CI dengan rumus :

$$CI = \frac{\lambda \text{ maks} - n}{n - 1}$$



λ :

ai eigen maksimum dari matriks perbandingan

n ialah kriteria atau jumlah alternatif yang dibandingkan

Menghitung nilai CR, nilai ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi relative dengan membandingkan nilai CI terhadap *Random Index* (RI). Adapun rumusnya ialah sebagai berikut :

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai RI merupakan indeks acak yang dikembangkan oleh Saaty (2000) berdasarkan jumlah kriteria atau matriks perbandingan berpasangan yang digunakan dalam analisis. Nilai RI digunakan sebagai pembanding untuk menilai tingkat konsistensi penilaian responden dalam penyusunan prioritas.

Nilai RI berdasarkan jumlah kriteria disajikan pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11. Nilai RI menurut Saaty (2000) ialah sebagai berikut ini :

| Jumlah Kriteria (n) | Nilai RI |
|---------------------|----------|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.58 |
| 4 | 0.90 |
| 5 | 1.12 |
| 6 | 1.24 |
| 7 | 1.32 |
| 8 | 1.41 |
| 9 | 1.45 |
| 10 | 1.49 |

Kemudian melakukan interpretasi nilai CR sebagai berikut :

CR < 0, maka dianggap error

CR = 0, maka dianggap sangat konsisten

CR > 0-1, maka dianggap konsisten

CR > 1, maka dianggap tidak konsisten

Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka memeriksa Kembali penilaian perbandingan berpasangan dan penilaian harus diulang kembali agar lebih konsisten dan rasional.

- j. Menghitung bobot prioritas kriteria atau alternatif, gunakan bobot yang dari hasil normalisasi matriks perbandingan sebagai prioritas sing kriteria atau prioritas alternatif.
perbandingan alternatif terhadap tiap kriteria



- l. Menghitung bobot global (gabungan) setiap alternatif dengan mengkalikan bobot alternatif x bobot kriteria lalu jumlahkan seluruh hasil tersebut untuk masing masing alternatif.
- m. Menentukan alternatif terbaik, alternatif dengan nilai prioritas total tertinggi adalah alternatif yang paling disarankan atau dipilih sebagai hasil akhir analisis AHP.

